

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023

9/11 Bulan September
BIRO TATA PEMERINTAHAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
1	2.10.11	PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	312.648.500	79,00	79,00	0,00	245.577.500	78,55	218.600.835	69,92	8,63						
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	79,00	79,00	0,00	245.577.500	78,55	218.600.835	69,92	8,63						
1.1.1	2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	79,00	79,00	0,00	245.577.500	78,55	218.600.835	69,92	8,63	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum					<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rapat koordinasi internal; 2. Tersampainya surat permohonan data wilayah administrasi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan surat Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Nomor 125 / 00131. 3. Penyusunan data wilayah tahun 2023 4. Telah dicetak buku Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY tahun 2023 5. Buku Kode dan Data Wilayah telah di distribusikan kepada OPO terkait <p>B. Laporan pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka percepatan penegasan batas kalurahan/keurahan di DIY. 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan BIG dalam rangka percepatan pelaksanaan Penegasan dan penetapan batas kalurahan/keurahan. 3. Terlaksananya Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Keurahan di DIY selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 - 28 Februari 2023 dengan Narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dihadiri peserta dari OPO Tim Teknis Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota se DIY dan perwakilan Lurah se DIY 4. Tersusunya Surat Gubernur DIY kepada Menteri Dalam Negeri terkait Laporan Penegasan Batas Kalurahan/Keurahan tahun anggaran 2022 5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penegasan Batas Kalurahan di Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo 6. Tersusunya draft Surat Permohonan laporan Pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota Semester 1 tahun 2023 7. Tersampainya Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas kalurahan/keurahan di DIY semester 1 dengan surat Nomor 146/9666 tanggal 31 Agustus 2023 8. Terlaksananya Asistensi teknis dan verifikasi hasil pelaksanaan penegasan batas desa di DIY dengan verifikasi oleh pejabat dari Badan Informasi Geospasial <p>C. Laporan Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan sinkronisasi batas daerah Kab. Gunungkidul - Kab. Wonorejo pada subsemen Kal. Sorongbaru - Desa Paranglupto 2. Telah dilaksanakan rapat kerja pembahasan usulan revisi permendagri batas DIY Jating pada segmen batas Kabupaten Sleman -Kab. Klaten dan Kab. Gunungkidul - Kab. Sukoharjo. 3. Telah dilaksanakan rapat kerja pembahasan usulan revisi permendagri batas Kab. Kulon Progo - Kab. Sleman 4. Telah dilaksanakan tinjauan lapangan dalam rangka konfirmasi garis batas dan konfirmasi status jalan pada perbatasan Kab. Gunungkidul - Kab. Sukoharjo sebagai tindak lanjut raker batas bulan Mei 2023 5. Telah disampaikan surat permohonan fasilitasi pembahasan usulan revisi permendagri nomor 19 tahun 2006 tentang batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 120/111 pada tanggal 18 Agustus 2023 kepada Kemendagri 6. Telah dilakukan penastanganan 18 usulan revisi Permendagri batas daerah Kab. Gunung Kidul-Kab. Klaten dan Kab. Kulon Progo-Kab. Purworejo di Kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayah Kemendagri pada tanggal 20 September 2023 <p>D. Laporan Sinkronisasi Garis Batas Daerah DIY - Jawa Tengah segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi melalui zoom meeting batas daerah Kab. Gunungkidul - Kab. Wonorejo pada sub segmen Kal Sorongbaru - Desa Paranglupto 2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan batas DIY - Jating Segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang di Kalurahan Gertosari, Ngargosari dan Pagarharjo 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan batas DIY - Jating Segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang di Kalurahan Banjarharjo dan Banjarjowo 4. Telah dilaksanakan rapat pembahasan dan expose hasil tinjauan lapangan batas DIY - Jating Segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang sebagai persiapan pelaksanaan Rapat kerja dengan Kab. Magelang dan Prov. Jawa Tengah. 5. Dilaksanakan rapat koordinasi dan inventarisasi permasalahan garis batas daerah dengan Pemkab Jawa Tengah terkait rencana Rapat Kerja Pembahasan Sinkronisasi Batas Daerah DIY - Jating segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang <p>E. Penyusunan peta batas daerah pada kawasan strategis Suruloyo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rapat koordinasi internal 2. Terkumpulnya data dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3. Terlaksananya pelacakan garis batas dan konfirmasi data persil tanah di kawasan strategis Suruloyo 4. Tersusunya peta batas daerah pada kawasan strategis Suruloyo 5. Kegiatan telah selesai dan pembahasan jasa konsultansi Penyusunan peta batas daerah pada kawasan strategis Suruloyo dengan SPK Nomor 027/0191 tanggal 21 Juni 2023 <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -efisiensi s.d bulan September dari pagu yg sudah diakukan SP2D sebesar Rp. 16.532.204 yaitu pada perijadin biasa sebesar Rp. 1.671.321, belanja bahan korvokur Rp. 378.490, ATK 275.759, kertas cover Rp. 153.075, cetak 541.300 , honor narasum Rp. 2.800.000, perijadin paket meeting 10.822.249 -efisiensi dari pagu yang belum diakukan SP2D sebesar Rp. 1.653.460,00 yaitu dari perijadin jakarta - terlapot pagu sebesar Rp. 1.671.000,00 yaitu kegiatan raker Kulon Progo-Magelang yang belum diakukan SP2D, karena Pemkab Magelang masih melakukan pemertan internal terkait data batas wilayah Magelang <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPO Tim Penegasan Batas Daerah/Kalurahan di DIY. - Koordinasi dan sinerg dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayah, Pemprov Jawa tengah, Pemkab di wilayah perbatasan berjalan baik dan lancar.
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.334.000	99,01	99,01	0,00	218.154.800	99,01	213.459.800	96,88	2,13						
2.1	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	24.464.000	91,12	91,12	0,00	22.284.800	91,09	22.284.800	91,09	0,00						
2.1.1	2.12.02.1.01.02	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.464.000	91,12	91,12	0,00	22.284.800	91,09	22.284.800	91,09	0,00	DIY	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi : 58 Dokumen dari 50 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (KK, KIA, KTP-E, Akta Kelahiran) : 57 dokumen dari 49 dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen : 1 dokumen dari 1 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan pendaftaran penduduk non permanen dan rentan admiduk tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan raker pendaftaran penduduk non permanen; 3. Terlaksananya rapat kerja pendaftaran penduduk non permanen pada tanggal 24 Februari 2023; 4. Terlaksananya rapat kerja pendaftaran penduduk rentan admiduk pada tanggal 15 Maret 2023; 5. Koordinasi-evaluasi pelaksanaan rapat kerja penduduk rentan dan penduduk non permanen pada bulan April 2023; 6. Terlaksananya koordinasi persiapan raker kerja penduduk rentan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni; 7. Terlaksananya rapat kerja penduduk rentan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023 dengan mengundang beberapa LUSA di wilayah DIY dan Dinas Dukcapil Kab/Kota se-DIY; 8. Terlaksananya rapat kerja penduduk non permanen yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 membahas mengenai progress pendaftaran dan pendaftaran penduduk non permanen di Kabupaten/Kota se-DIY; 9. Terlaksananya fasilitasi dan penyerahan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan pada bulan Agustus 2023; 10. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan pada bulan September 2023; <p>Tematik Kemiskinan Ekstrem & RB Tematik Pempertanian Kemiskinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan rapat kerja pendaftaran penduduk rentan admiduk sebanyak 2 kali pada tanggal 15 Maret 2023 dan 14 Juni 2023 dengan mengundang beberapa parti/LUSA di wilayah DIY serta Dinas Dukcapil Kab/Kota se-DIY untuk selanjutnya parti/LUSA melakukan pendaftaran anak asuhnya yang belum memiliki dokumen kependudukan (KK, Akta Kelahiran, KIA, dan KTP-4/5). - Sejalan terkumpul data dari parti/LUSA, dokumen pendukung disampaikan ke Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk dapat segera diterbitkan dokumen kependudukan; - Sampai dengan bulan September 2023 telah terfasilitasi sebanyak 57 dokumen administrasi kependudukan kepada anak parti/LUSA. 		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Realisasi (%)	Devisi	Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SPOD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Devisi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)								
2.2	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	195.870.000	100,00	100,00	0,00	195.870.000	100,00	191.175.000	97,60	2,40						<p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahamnya masyarakat terkait kegunaan dokumen administrasi kependudukan dan pendaftaran penduduk non permanen. - Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkaitan dengan administrasi jaraknya cukup jauh sehingga masyarakat menunda untuk melaporkan peristiwa kependudukannya. - Telah dilakukan jemput bola pelayanan administrasi namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukannya. <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY - terdapat layanan jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sehingga dapat mempermudah layanan administrasi kepada panti dan LKSA
2.2.1	2.12.02.1.02.01	Facilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	19.220.000	100,00	100,00	0,00	19.220.000	100,00	18.645.100	97,01	2,99	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rapat Kerja Facilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dari 1 Laporan			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi terkait pendaftaran penduduk tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi terkait fasilitasi pendaftaran penduduk pada bulan Januari 2023; 3. Terlaksananya rapat kerja pendaftaran warga negara asing di wilayah NGRJ secara daring dengan peserta dan penusahaan/ponsor yang memiliki pegawai WNA dan narasumber dari Digos Dukcapil Kemendagri dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2023; 4. Terlaksananya kegiatan coffee morning terkait pendaftaran WNA di DIY bersama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-DIY dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta pada 14 Maret 2023; 5. Terlaksananya kaffee terkait Kartu Identitas Anak dan Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing di Wilayah NGRJ pada bulan April 2023; 6. Terselenggaranya Rapat Kerja Pendaftaran Penduduk pada tanggal 23 Mei 2023 dengan peserta dari mahasiswa/UGM, UNW, UIN, UPI dan UII; 7. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan rapat kerja pendaftaran penduduk pada bulan Mei 2023; 8. Terlaksananya rapat koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota pada 20 Juli 2023 membahas terkait proses kegiatan pendaftaran penduduk dan rencana kegiatan semester 2 tahun 2023; 9. Terlaksananya evaluasi internal kegiatan fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk pada bulan September 2023. <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efisiensi using transportasi peserta raker warga negara asing pada bulan Februari 2023 sebanyak Rp.450.000 - efisiensi belanja alat tulis kantor bulan April 2023 sebanyak Rp 25.200 - efisiensi belanja kertas cover bulan April 2023 sebanyak Rp 5.200 - efisiensi using transportasi peserta raker fasilitasi pendaftaran penduduk pada bulan Mei 2023 sebanyak Rp 60.000 - efisiensi belanja flashdisk bulan Juli 2023 sebesar Rp 4.400 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
2.2.2	2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	176.650.000	100,00	100,00	0,00	176.650.000	100,00	172.529.900	97,67	2,33	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan : 1 Laporan dari 1 Laporan			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan sosialisasi terkait administrasi kependudukan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan sosialisasi pada bulan Februari 2023 dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota, Kapanewon/Kemantren, Kalurahan/Kelurahan yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi; 3. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Permemadagri 73 Tahun 2023 pada tanggal 14 Februari 2023 dengan peserta dan TP PKK di beberapa Kapanewon dan Perwakkilan IBI di DIY; 4. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 16 Februari 2023 di Kalurahan Gwangsan; 5. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 17 Februari 2023 di Kalurahan Suryalmajan; 6. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Permemadagri 73 Tahun 2023 pada tanggal 15 Februari 2023 melalui surat kabar Tribun Jogja; 7. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA yang dilakukan di Kalurahan Gwangsan dan Suryalmajan pada tanggal 20 Februari 2023 melalui surat kabar Tribun Jogja; 8. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 2 Maret 2023 di Kapanewon Sentolo; 9. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 3 Maret 2023 di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman; 10. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 9 Maret 2023 di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kulon Progo; 11. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 16 Maret 2023 di Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Sleman; 12. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 17 Maret 2023 di Kapanewon Gamping, Sleman; 13. Terlaksananya koordinasi persiapan sosialisasi pada bulan April 2023 dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota, Kapanewon/Kemantren, Kalurahan/Kelurahan yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi; 14. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 11 Mei 2023 di Kalurahan Pengasih, Kulon Progo; 15. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 19 Mei 2023 di Kalurahan Sinduadi, Sleman; 16. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 25 Mei 2023 di Kapanewon Sewon, Bantul; 17. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 26 Mei 2023 di Kapanewon Betah, Sleman; 18. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 5 Juni 2023 di Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Gunungkidul; 19. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 5 Juni 2023 di Kapanewon Wonosari, Gunungkidul; 20. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 15 Juni 2023 di Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Gunungkidul; 21. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 22 Juni 2023 di Kapanewon Palihan, Gunungkidul; 22. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital di lingkungan Kraton Ngayogyakarta pada 24 Juli 2023 dan Kadipaten Pakualaman pada 26 Juli 2023; 23. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital layanan di lingkungan Kraton Ngayogyakarta pada 7 dan 8 Agustus 2023; 24. Terlaksananya sosialisasi terkait administrasi kependudukan di media sosial pada bulan September 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 85.200 - efisiensi belanja kertas dan cover sebesar Rp 14.700 - efisiensi belanja balok sebesar Rp 20.200 - efisiensi honor narasumber karena ketidakhadiran DPRD sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Administrasi di Kalurahan Bendungan, Wates, Kulon Progo 9 Maret 2023 sebesar Rp 1.000.000,- - efisiensi honor narasumber karena ketidakhadiran DPRD DIY sebagai narasumber kegiatan Sosialisasi Administrasi di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul 9 Juni 2023 sebesar Rp 1.000.000,- - kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang rencana dilaksanakan pada bulan September ditunda pelaksanaannya karena perubahan anggaran dan refoocusing tahun 2023 yg masih menunggu tindak lanjut (sebesar Rp 2.000.000,-) <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.142.900	67,75	67,75	0,00	48.784.500	67,62	48.437.200	67,14	0,48						
3.1	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	41.622.200	99,40	99,40	0,00	41.294.700	99,21	40.596.400	97,54	1,67						
3.1.1	2.12.03.1.01.04	Facilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	41.622.200	99,40	99,40	0,00	41.294.700	99,21	40.596.400	97,54	1,67	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Terpadu Facilitasi Dokumen Administrasi Kependudukan : 1 Laporan dari 1 Laporan			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tahun 2023 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait kegiatan fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil tahun 2023; 3. Terlaksananya pengabdian peralatan penunjang pelayanan terpadu (planning kit, film, ribbon) pada bulan Maret 2023; 4. Terlaksananya penyusunan konsep pelayanan terpadu yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2023; 5. Terlaksananya koordinasi internal terkait pelaksanaan pelayanan terpadu; 6. Terlaksananya koordinasi terkait lokasi kabupaten yang akan menjadi lokasi pelayanan terpadu dengan memperhatikan jumlah warga KTP-el yang belum dilaksanakan pemekaman biometrik; 7. Telah dilakukan permohonan personel pelayanan terpadu kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota; 8. Telah dilakukan penempatan personel pada bulan Juli 2023; 9. Terlaksananya pelayanan terpadu perekaman KTP-el di Kabupaten Gunungkidul selama dua hari pada 23 Agustus 2023 (SMA 1 Wonosari (148) dan SMA N 2 Wonosari (584)) dan 24 Agustus (SMA N 3 Wonosari (270) dan SMA 2 Playen (91)). Hasil pelayanan selama dua hari perekaman KTP-el sebanyak 677 orang dan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Devisi	Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SPOD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Devisi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							
																	<p>penerbitan Identitas Pendudukan Digital sebanyak 102 orang.</p> <p>10. Terlaksananya koordinasi internal mengenai evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu pada bulan Agustus 2023.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahalannya masyarakat terkait kepengurusan dokumen administrasi pendudukan. - Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukannya. - Efisiensi belajar kegiatan alat penunjang pelayanan terpadu (design kit, film, ribbon) sebesar Rp 298.300 - banyak siswa usia 15 tahun keatas sudah melakukan perekaman di Kapanewon/Dinas Dukcapil <p>Faktor Peningkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Biro Tapem DIY dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP-e di sekolah dan pendafaran Identitas Kependudukan Digital
3.2	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	30.520.700	24,60	24,60	0,00	7.489.800	24,54	7.840.800	25,69	-1,15						
3.2.1	2.12.03.1.02.01	Facilitasi terkait Pencatatan Sipil	26.104.500	13,70	13,70	0,00	3.573.600	13,69	3.533.500	13,54	0,15		DIY	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pencatatan Sipil : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelayanan Facilitasi Isbat Nikah : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi terkait pencatatan sipil tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan fasilitasi terkait pencatatan sipil tahun 2023; 3. Terdistribusikannya surat terkait permohonan pendataan potensi isbat nikah di Kabupaten/Kota pada bulan Maret 2023; 4. Pendataan potensi isbat nikah di Kabupaten/Kota di DIY pada bulan April 2023; 5. Monitoring pendataan potensi isbat nikah di Kabupaten/Kota di DIY pada bulan Mei 2023; 6. Koordinasi terkait tindak lanjut surat permohonan data potensi isbat nikah di Kabupaten/Kota dengan batas maksimal penyampaiannya data pada akhir bulan Juni; 7. Terkonfirmasi potensi isbat nikah di Kabupaten Kulon Progo yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan isbat nikah, sehingga kegiatan isbat nikah yang direncanakan di Kabupaten Kulon Progo batal dilaksanakan; 8. Terverifikasi data potensi pasangan yang akan dibat nikahkan untuk dikumpulkan di KIA Saptosari dan dibuatkan surat pengantar dari KIA kepada Pengadilan Agama Wonosari untuk verifikasi dan validasi; 9. Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten Gunungkidul pada bulan September 2023 dalam rangka koordinasi dan persiapan pelaksanaan isbat nikah serta pembayaran panjar isbat nikah; <p>RB Tematik Pengentasan Kemiskinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pendataan potensi isbat nikah di seluruh Kabupaten/Kota di DIY sejak awal tahun 2023; - Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta menyatakan tidak ada potensi isbat nikah yang dapat dilakukan; - Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo menyampaikan terdapat potensi isbat nikah di wilayahnya namun dari hasil pendataan, potensi isbat nikah di Kabupaten Kulon Progo tidak memenuhi syarat untuk dilakukan isbat nikah, sehingga kegiatan isbat nikah yang direncanakan di Kabupaten Kulon Progo batal dilaksanakan; - Terdapat potensi isbat nikah di Kabupaten Gunungkidul, sehingga akan dilakukan isbat nikah untuk 20 pasangan pada bulan Oktober 2023; - Pada bulan Agustus, telah dilakukan inventarisasi data potensi pasangan yang akan dibat nikahkan untuk dikumpulkan di KIA Saptosari dan dibuatkan surat pengantar dari KIA kepada Pengadilan Agama Wonosari untuk verifikasi dan validasi; - Verifikasi dan validasi berkas isbat nikah dilaksanakan pada bulan September 2023 oleh Pengadilan Agama Wonosari; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahalannya masyarakat terkait kepengurusan dokumen administrasi pendudukan. - Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkaitan dengan adminduk jarangny cukup jauh sehingga masyarakat menunda untuk melaporkan peristiwa kependudukannya. - Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukannya. - Efisiensi belajar ATK bulan Januari sebesar Rp 40.100 <p>Faktor Peningkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kab.Kota - Terjin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pengikat Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, KIA Kapanewon Saptosari, Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul 		
3.2.2	2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	4.416.200	89,00	89,00	0,00	3.916.200	88,68	4.307.300	97,53	-8,85		Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Provinsi terkait Pencatatan Sipil : 8 Dokumen dari 3 Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemberian Insentif Bagi Anak Pemilik KIA di Wilayah DIY : 8 Dokumen dari 3 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan non pemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan kerja sama pemberian insentif bagi pemegang KIA tahun 2023; 3. Terlaksananya kegiatan rapat kerja sama penandatanganan kartu identitas anak di DIY pada tanggal 21 Maret 2023; 4. Tersusunnya dokumen perjangjangan perjangjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemda DIY dengan Museum Ullen Sentral, Rodalink Modern Bicycle Outlet Yogyakarta, Toko Buku Diskon Togamas Affandi Yogyakarta, Kay's Studio Yogyakarta, Gramedia Sudirman Jogja, Puri Mataram Resto Cafe & Wahana Wisata, Gardena Department Store & Supermarket, PT Produk Rekreasi (Kids Fun) pada bulan April 2023; 5. Terlaksananya perjangjangan perjangjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemda DIY dengan Museum Ullen Sentral, Rodalink Modern Bicycle Outlet Yogyakarta, Toko Buku Diskon Togamas Affandi Yogyakarta, Kay's Studio Yogyakarta, Gramedia Sudirman Jogja, Puri Mataram Resto Cafe & Wahana Wisata, Gardena Department Store & Supermarket, PT Produk Rekreasi (Kids Fun); 7. Terlaksananya penandatanganan perjangjian kerja sama pemberian insentif bagi pemilik KIA di DIY pada tanggal 23 Juni 2023 antara Pemda DIY dengan Obelix Group Yogyakarta, Purwa Caraka Musik Studio Yogyakarta, Berings Cofee Yogyakarta, Rhythm Star Music School Yogyakarta, Hugo Violin School Yogyakarta, Haji Chicken & Ayam Geprek Sa'i Yogyakarta; 8. Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders yang telah melakukan kerja sama pemberian insentif bagi anak pemilik KIA di DIY untuk memerhatikan hari anak nasional pada bulan Juli dengan memberikan diskon khusus; 9. Terlaksananya koordinasi dengan Nawagreen Sleman yang berminat untuk melakukan kerja sama pemberian insentif KIA di DIY pada bulan Agustus 2023; 10. Terlaksananya penandatanganan perjangjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemerintah Daerah DIY dengan Nawagreen Sleman pada bulan September 2023 secara desk to desk; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 6.900 karena harga mibz yang lebih rendah dari anggaran yang ada; - efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 100.000 <p>Faktor Peningkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik antara mitra kerja sama / stakeholders yang memberikan insentif bagi pemegang KIA di DIY 		
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	67.573.800	86,78	86,78	0,00	57.783.800	85,51	55.489.613	82,12	3,39						
4.1	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	67.573.800	86,78	86,78	0,00	57.783.800	85,51	55.489.613	82,12	3,39						
4.1.1	2.12.04.1.02.01	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.331.100	92,00	92,00	0,00	29.381.100	90,88	28.437.613	87,96	2,92		Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemertan Data</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi pendudukan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan fasilitasi terkait ISAK tahun 2023; 3. Telah tersedianya data konsolidasi bersih (KDB) semester II tahun 2022 pada bulan Maret 2023; 4. Terlaksananya penyelesaian operasional SIMK pada bulan April 2023 dalam rangka mendukung Dukcapil Goes to Campus UGM "Layanan Identitas Kependudukan Digital"; 5. Terlaksananya pengembangan sistem informasi untuk mendukung seleksi PPSB DIY tahun 2023 pada bulan Mei 2023; 5. Tersedianya data kependudukan untuk mendukung PPSB SMA/K DIY 2023 dan terselesainya aduan terkait data kependudukan calon siswa SMA/K melalui sistem informasi sinkronisasi data PPSB DIY pada bulan Juni 2023; 7. Telah dilakukan layanan pendafaran Identitas Kependudukan Digital di lingkungan Kraton Ngoyogyakarta dan Kadipaten Pakulaman dan memastikan jaringan pelayanan berjalan dengan baik pada bulan Juli 2023; 8. Telah dilakukan layanan pendafaran Identitas Kependudukan Digital lanjutan di lingkungan Kraton Ngoyogyakarta dan memastikan jaringan pelayanan berjalan dengan baik pada 7 dan 8 Agustus 2023; 9. Terlaksananya pelayanan terpadu perekaman KTP-e dan pendafaran Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Gunungkidul serta memastikan jaringan pelayanan berjalan dengan baik pada 23 dan 24 Agustus 2023; 		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SPOD	Keuangan	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	10. Telah dilakukan belanja operasional SIMAK untuk service perangkat komputer yang digunakan untuk mengakses SIMA pada bulan September 2023. Faktor Penghambat: - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebanyak Rp 139.100 - efisiensi belanja kertas dan cover Rp 6.000 - efisiensi belanja internet bulan Januari Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Februari Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Maret Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan April Rp 52.043 - efisiensi belanja pemeliharaan operasional SIMAK pada bulan April Rp 20.000 - pengembangan sistem informasi untuk mendukung seleksi PPOB DIY 2023 terkait administrasi dilaksanakan pada bulan Mei 2023 menyesuaikan kesialan pelaksanaan PPOB di Dinas Diponegoro - efisiensi belanja internet bulan Mei Rp 52.043 - efisiensi belanja pengembangan sistem informasi untuk mendukung seleksi PPOB DIY tahun 2023 bulan Mei 2023 sebesar Rp 300.000 - efisiensi belanja internet bulan Juni Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Juli Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Agustus Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan September Rp 52.043 Faktor Pendukung: - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY - koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dalam proses seleksi PPOB DIY 2023
4.1.2	2.12.04.1.02.05	Penyenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.242.700	82,00	82,00	0,00	28.402.700	80,59	27.052.000	76,76	3,83		Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Rapat Kerja Terkait Pemili : 2 Dokumen dari 2 Dokumen		1. Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Rapat Kerja Terkait Pemili : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 4. Target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output. Faktor Penghambat: - belum ada anggaran kas keuangan pada triwulan 1 karena penganggaran dimulai pada bulan April 2023 namun persiapan dan kegiatan telah dilakukan tanpa dukungan anggaran. - terbatasi akses database kependudukan akibat penerapan SIMAK terpadu, saat ini database kependudukan dikelola sepenuhnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri - Efisiensi honor narasumber rapat kerja data pemilukada 2024 karena ketidakhadiran narasumber (DPRD DIY) pada bulan Juni 2023 sebesar Rp 1.000.000 - terdapat sisa belanja alat tulis kantor dan kertas pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 50.700 - efisiensi uang transport peserta Rapat Kerja "Administrasi Kependudukan Terttu, Koordinasi Kuat, Optima Pemili di DIY Aman, Jurdil dan Damai" pada tanggal 22 September 2023 karena beberapa peserta dari kabupaten/sebesar Rp 300.000. - Deviasi keuangan disebabkan karena ketidakefisienan realisasi di Sengguh dengan SPJ Fungsional. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat dengan BPKA belum sinkron, sehingga hal tersebut di luar kendali kami. Faktor Pendukung: - Instansi/OPD dapat melakukan pemanfaatan data kependudukan melalui Dinas Dukcapil
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	41.126.000	100,00	100,00	0,00	41.126.000	100,00	41.126.000	100,00	0,00						
5.1	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	41.126.000	100,00	100,00	0,00	41.126.000	100,00	41.126.000	100,00	0,00						
5.1.1	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Pemetaan, Pencatatan, Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	41.126.000	100,00	100,00	0,00	41.126.000	100,00	41.126.000	100,00	0,00		Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyek Kependudukan Serta Kebutuhan Lain : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Profil Data dan Proyek Kependudukan DIY Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen		1. Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyek Kependudukan Serta Kebutuhan Lain : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Profil Data dan Proyek Kependudukan DIY Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Terdistribusikannya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri pada bulan Februari - Maret 2023. 4. Terdistribusikannya surat permohonan data pendukung penyusunan profil kependudukan tahun 2022 di bidang kesehatan dan pendidikan kepada Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Diponegoro DIY. 5. Terlaksananya proses pengumpulan data kependudukan semester II 2022 dan data dukung lainnya dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan. 6. Terselenggaranya data pendukung penyusunan profil kependudukan tahun 2022 diantaranya kompres data konsolidasi bersih dan data dari Dinas Diponegoro DIY. 7. Telah dilakukan rapat koordinasi dan penyusunan buku profil kependudukan tahun 2022 oleh tenaga ahli. 8. Terselenggaranya buku profil kependudukan tahun 2022 dan dilakukan publikasi melalui website biro tata pemerintahan. 9. Terlaksananya evaluasi internal terkait penyusunan buku profil kependudukan tahun 2022. Faktor Penghambat: - kegiatan persiapan pada semester 1 / tw 1 dan tw 2 dapat dilaksanakan tanpa dukungan anggaran, anggaran kegiatan ditangguhkan mulai bulan Juli 2023 untuk persiapan jasa konsultasi penyusunan profil kependudukan pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 500.000. Faktor Pendukung: - Terselenggaranya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2022
6	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	94,69	94,69	0,00	47.107.700	94,22	37.512.600	75,03	19,19						
6.1	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Penguasaan Penyenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	94,69	94,69	0,00	47.107.700	94,22	37.512.600	75,03	19,19						
6.1.1	2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	15.306.800	93,60	93,60	0,00	14.286.400	93,33	13.627.100	89,03	4,30	Testimoni Ketua RW/Nyayata terkait aktivitas Subkegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	https://tmyrf.com/testimoniKetuaNyayata	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Koordinasi dalam konteks desa / kulurahan di DIY sehubungan adanya kebijakan penataan desa dalam arah kebijakan reformasi birokrasi - Pelaksanaan Rapat Kerja Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa dengan penguatan manajemen pada aspek inovasi pelayanan publik di Kulurahan pada tanggal 18 Juli melibatkan pemateri dari unsur peneliti "Institut for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Kepala Balai Pemerintahan Desa Kemendagri Yogyakarta, serta Lurah Pleret sebagai best practice pelaksanaan inovasi layanan di Kulurahan. Faktor Penghambat: - tidak ada tambahan berarti Faktor Pendukung: - Kesediaan Nyayata selaku Paguyuban Lurah dan Pemang Provisi untuk hadir memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi - Kesediaan peserta khususnya dari Kemendagri dan Dinas PMA 4 Kabupaten untuk hadir memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi - Komitmen waktu dan penyampaian materi yang relevan sesuai tema oleh narasumber dalam pelaksanaan rapat kerja pembinaan manajemen pemerintahan desa	
6.1.2	2.13.04.1.01.04	Facilitasi Penyusunan, Pemantauan, Pelaksanaan dan Penguasaan Pembangunan Desa	18.088.400	95,70	95,70	0,00	17.176.500	94,96	8.917.400	49,30	45,66						
6.1.2	2.13.04.1.01.04	Facilitasi Penyusunan, Pemantauan, Pelaksanaan dan Penguasaan Pembangunan Desa	18.088.400	95,70	95,70	0,00	17.176.500	94,96	8.917.400	49,30	45,66						
6.1.2	2.13.04.1.01.04	Facilitasi Penyusunan, Pemantauan, Pelaksanaan dan Penguasaan Pembangunan Desa	18.088.400	95,70	95,70	0,00	17.176.500	94,96	8.917.400	49,30	45,66						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SPOD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>Balai PMD dan IRE Yogyakarta dan Kalurahan Penggingharjo tanggal 8 Agustus.</p> <p>Target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat keci secara intens.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpadat satu aktivitas kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu penetapan APBD Perubahan 2023 dan kebijakan refoocusing karena arahan dari TAPD kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi Kemendagri, namun target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat keci secara intens. <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan Nyantra untuk hadir memberikan arahan - Kesiapan peserta khususnya dari Kemendagri dan Dinas PMK 4 Kabupaten untuk hadir memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi - Komitmen waktu dan penyampaian materi yang relevan sesuai tema oleh narasumber dalam pelaksanaan rapat kerja pembinaan manajemen pemerintahan desa
6.1.3	2.13.04.1.01.05	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.604.800	94,60	94,60	0,00	15.644.800	94,22	14.966.100	90,14	4,08					<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pembinaan pengelolaan keuangan desa terhadap Kalurahan Selomartani dalam persiapan pengabdian pertanggungjawaban APBDK BKX Penanda Kestimewaan - Rapat Koordinasi Fasilitas Keuangan Desa dengan Dinas PMK Kabupaten - Rapat Kerja Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan sasaran 15 perwakilan lurah dari 4 Kabupaten serta 10 P1newu pada tanggal 26 Mei 2023 - Rapat Koordinasi Fasilitas Keuangan Desa terkait penerapan aplikasi Siskeudes <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada hambatan berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan waktu dan penyampaian materi yang relevan dari narasumber saat pelaksanaan rapat kerja fasilitas pengelolaan keuangan desa
7	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	385.850.700	8,37	8,37	0,00	31.415.900	8,14	24.182.092	6,27	1,87					
7.1	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permusuman	133.725.000	4,43	4,43	0,00	5.670.700	4,24	1.973.692	1,48	2,76					
7.1.1	2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjangan	133.725.000	4,43	4,43	0,00	5.670.700	4,24	1.973.692	1,48	2,76		DIY			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pembentukan Tim Hari Jadi DIY 2. Telah terlaksana Rapat Persiapan Penyusunan NA Hari Jadi DIY 2023 3. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi DIY pada Selasa, 8 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB - selesai di Ruang Rapat Srangw Praja, Gedung Kresna Lantai 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pada rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dihadiri oleh Tenaga Ahli, perwakilan Institute for Research and Empowerment (IRE), Sekretaris DPRD DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 4. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi DIY pada Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB - selesai di Ruang Rapat Srangw Praja, Gedung Kresna Lantai 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pada rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dihadiri oleh Tenaga Ahli, perwakilan Institute for Research and Empowerment (IRE), Sekretaris DPRD DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 5. Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Hari Jadi DIY pada tanggal 22 September 2023 pada pukul 13.00 WIB - selesai di Ruang Rapat Srangw Praja, Unit 2, Lantai 1 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Adanya perubahan jadwal kegiatan yang telah direncanakan dari awal karena menyelesaikan pihak eksternal (sudah penyusunan Perubahan Proppempera di DPRD DIY), sehingga Rapat kerja yang sedang akan dilaksanakan bulan Agustus tidak dapat terlaksana sehingga terdapat efisiensi beberapa komponen belanjanya diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mamin harlan umum sebesar Rp1.275.000 - narasumber sebesar Rp2.000.000 <p>(Tidak mempengaruhi capaian output, ditinjau melalui daring)</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi dan Koordinasi antar OPD terkait dan Tenaga Ahli - Tersedianya anggaran dan peralatan kantor yang memadai
7.2	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Kestimewaan Urusan Kebudayaan	252.125.700	10,46	10,46	0,00	25.745.200	10,21	22.208.400	8,81	1,40					
7.2.1	2.22.08.5.06.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Kestimewaan	252.125.700	10,46	10,46	0,00	25.745.200	10,21	22.208.400	8,81	1,40		BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat Penanda Kestimewaan 2) Koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman pada hari Selasa, 16 Januari 2023 dengan hasil Kalurahan Selomartani perlu menjalankan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusulan proposal kegiatan pembangunan Papan Penanda Kestimewaan oleh Kalurahan Selomartani; b. Proses pengadaan barang dan pembangunan; c. Pelaporan hasil pembangunan Papan Penanda Kestimewaan. 3) - Rapat Koordinasi terkait Penanda Kestimewaan pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Popyudyan Semar Sernobogo sejumlah 25 orang dengan pembahasan tindak lanjut penerapan kelemmbagaan kalurahan atas ketersediaan sarana prasarana di tingkat Padukuhan sebagai entitas terkecil dengan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Laporan pertanggungjawaban hasil BKK Papan penanda kestimewaan oleh Kalurahan Selomartani 4) - Koordinasi pelaksanaan pembangunan papan penanda kestimewaan dilakukan untuk memonitor pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, yaitu dengan sasaran 301 kalurahan dengan hasil: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pertanggungjawaban dengan koordinasi bersama TAPD (Panasadya dan BPKA) dan Pemerintah Kalurahan, sampai dengan 13 Februari hasil rekapitulasi terdapat perbedaan dengan catatan sebagai berikut: Biro Tapem ada 42 laporan belum masuk, BPKA ada 11, Panasadya ada 16, sehingga selisih data ada 77 kalurahan yang kemudian dikoordinasikan dengan komunikasi secara langsung dengan Kalurahan terkait. b. Koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan Balai Padukuhan diarahkan 23 Kalurahan dan Gunungkidul pada tanggal 2 dan 6 Maret 2023 terkait koordinasi pemahaman teknis pelaksanaan pembangunan Balai Padukuhan. c. Koordinasi terkait persiapan pencairan rehabilitasi Balai Padukuhan di Kabupaten Gunungkidul dan pererapan nilai kestimewaan pada bangunan Balai Padukuhan pada tanggal 30 Maret 2023 dan 11 April 2023. d. Koordinasi terkait persiapan pencairan pemasangan QR Code Tahun 2023 pada tanggal 5 April 2023 <p>- Koordinasi untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil kajian pembangunan kantor kalurahan dan Balai Padukuhan pada Rabu, 10 Mei 2023 untuk membahas proses usulan rehab Balai Padukuhan dengan leading sector Dinas PUP-ESDM DIY dan direncanakan akan diakhiri ke Kabupaten, dengan hasil: status tanah yang diusulkan untuk direhab agar diormati.</p> <p>- Koordinasi dan pemantauan progres pembangunan papan penanda kestimewaan pada Kalurahan Selomartani pada tanggal 7 Juni 2023 dengan hasil bahwa pembangunan sudah 100%, sementara laporan pertanggungjawaban masih dalam proses. Diarahkan kepada Kalurahan Selomartani untuk segera menyusun dengan format tertentu kepada Gubernur melalui Panitia Kestimewaan dengan tembusan BPKA DIY dan Biro Tapem serta kelengkapan laporan disertai dokumentasi.</p> <p>- Koordinasi dan pemantauan progres pembangunan papan penanda kestimewaan pada Kalurahan Selomartani dengan progres pada tanggal 23 Juni Pemerintah Kalurahan Selomartani menyerahkan Laporan BKK Pembangunan Papan Penanda Kestimewaan</p> <p>2) Kajian Penanda Wilayah Kestimewaan</p> <p>- Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan kajian pada tanggal 14 dan 24 Agustus 2023 melibatkan Tim Tenaga Ahli dengan hasil sebagai langkah awal akan dilakukan observasi untuk mendapatkan informasi database pada batas wilayah dan areanya, kemudian analisis data, dan terakhir hasil kesimpulan akan diujikan dalam forum yang lebih besar, yaitu FGD</p> <p>3) Pemasangan Quick Response System (QRS Code) Pada Papan Penanda Kestimewaan di 302 Kalurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelidikan Pemahaman Pelaksanan Teknis Pembuatan dan Pemasangan QRS Code - Penyajian Eterl Dokumen Pengadaan pada web LPSE <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya redesain Kajian Gapura Pemerintah Kalurahan, sehingga kegiatan menunggu penetapan perubahan Das Tahap 1 2. Tidak ada hambatan yang berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan Pemerintah Kalurahan Selomartani untuk menjalankan BKK Pembangunan Papan Penanda Kestimewaan - Ketepatan waktu Pemerintah Kalurahan Selomartani untuk melaksanakan pembangunan papan penanda kestimewaan dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban - Komitmen tenaga ahli pada Kajian Penanda Wilayah

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SPOD	Keuangan	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
8	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	608.366.100	73,38	73,38	0,00	431.946.800	71,00	383.656.392	63,06	7,94					dalam koordinasi - Keslap penyusunan dokumen pengaduan pemangangan QIS Code pada Papan Papan Penanda Kostimewaan di 302 Kelurahan
8.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.719.900	84,10	84,10	0,00	17.882.800	82,33	17.528.900	80,70	1,63					
8.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.247.200	80,00	80,00	0,00	8.746.000	77,76	8.525.800	75,80	1,96		Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kurahan dan Kaparewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan Renstra 2022-2027 2. Penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2022-2027 sesuai dengan RPJMD 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II 4. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Eselon II 5. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan Renja 2024 6. Penyusunan Dokumen Renja 2024 sesuai dengan Renstra 7. Revisi Dokumen Renstra 2022-2027 8. Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024 9. Penyusunan Perjanjian Kinerja Anggaran dan Kegiatan untuk Tahun 2024 (RKA) 10. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan Tahun 2024 (RKA) 11. Pencermatan RKA 2024 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2023 12. Revisi RKA 2024 13. Terselenggaranya entry renja dan renstra di SIPD 14. Penyelesaian naratif renstra 2022-2027 15. Penyelesaian naratif renja 2024 16. Entry pagu pasca rekrusung 2024 di SIPD 17. Cetak Rancangan Akhir Renstra Tahun 2022-2027 18. Entry rincian belanja 2024 di Aplikasi SIPD baru 19. Identifikasi pagu RPMD Perubahan 2023 20. Penyelesaian Renja 2023 Perubahan 21. SAPSD Perubahan 2023 22. Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2024 23. Entry pengesahan pagu dan perubahan TLK di SIPD <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi Honor narasumber Forum Perangkat Daerah dilaksanakan PMS tidak bisa diberi honorarium, hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Entry rincian belanja pada Aplikasi SIPD yang baru perlu dijabar secara mandiri. 3. Aplikasi SIPD yang masih dalam pengembangan menyebabkan entry memakan waktu. 4. SHB dalam SIPD baru belum bisa terakomodir semua, sehingga menghambat proses entry. <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi internal yang solid 2. Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Keaktifan pegawai berkoordinasi dengan TAPD
8.1.2	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.472.700	88,50	88,50	0,00	9.136.800	87,24	9.003.100	85,97	1,27		Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kurahan dan Kaparewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan 2. Dokumen LKIP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan monev : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (LPT) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desak internal realisasi keuangan dan fisik pada Biro 2. Desak pembalik triwulan 2 oleh TAPD 3. Tindak lanjut catatan atas desk pembalik TW 2 4. Evaluasi subbagian kemiskinan 5. Menyusun implementasi SKMP 2023 <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan di Bmzmarket mengakibatkan penyerapan tertunda. 2. Terdapat titik aka kinerja yang mengalami perubahan yang akibatnya memperlambat aktivitas sehingga mengurangi penyerapan anggaran <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terseleskannya laporan tepat waktu.
8.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.724.600	81,12	81,12	0,00	34.133.600	78,07	34.002.800	77,77	0,30					
8.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.560.000	78,75	78,75	0,00	23.670.000	75,00	23.670.000	75,00	0,00		Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kurahan dan Kaparewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan bahan 2. Pengumpulan data terkait dengan tanggungjawab keuangan seluruh program sampai dengan Bulan September 3. Penyusunan laporan keuangan dan sudah terverifikasi sampai dengan bulan September 4. Pemaksimalan honorarium tim penatausahaan keuangan Triwulan 3 tahun 2023 <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menu-menu dalam aplikasi SIPD penatausahaan keuangan belum sempurna karena data-datanya belum terintegrasi, sehingga Bendahara harus membuat laporan keuangan manual sebagai pendamping <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terseleskannya laporan tepat waktu.
8.2.2	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.644.400	95,00	95,00	0,00	4.344.400	93,54	4.260.800	91,74	1,80		Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kurahan dan Kaparewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hesi Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Keuangan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2. Penyusunan laporan keuangan dan sudah terverifikasi sampai dengan bulan September 3. Pemaksimalan honorarium tim penatausahaan keuangan Triwulan 3 tahun 2023 <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menu-menu dalam aplikasi SIPD penatausahaan keuangan belum sempurna karena data-datanya belum terintegrasi, sehingga Bendahara harus membuat laporan keuangan manual sebagai pendamping <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terseleskannya laporan tepat waktu.
8.2.3	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.520.200	82,50	82,50	0,00	6.119.200	81,37	6.072.000	80,74	0,63		Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kurahan dan Kaparewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD : 4 Laporan dari 4 Laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Triwulanan : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan Prognosis : 1 Laporan dari 1 Laporan <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi harga alat tulis kantor di bawah standar DPA 2. Perubahan kebijakan di Bmzmarket mempengaruhi pembelian kebutuhan keuangan <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terseleskannya laporan tepat waktu.
8.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	77,00	77,00	0,00	8.550.000	75,00	8.550.000	75,00	0,00					
8.3.1	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	77,00	77,00	0,00	8.550.000	75,00	8.550.000	75,00	0,00		Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kurahan dan Kaparewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Aset SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi ulang kondisi BMD 2. Pembuatan kartu pemangangan BMD 3. Pengusutan barang untuk dihapus 4. Konversi kendaraan dinas roda dua berban bakar minyak menjadi kendaraan listrik roda dua 5. Pembayaran honorarium pengusutan barang milik daerah sampai dengan triwulan 3 <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak kondisi barang yang sudah mulai rusak (seperti komputer, laptop, printer, dll) tetapi tidak diizinkan untuk pengaduan <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terseleskannya laporan tepat waktu.
8.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.171.900	70,54	70,54	0,00	253.981.200	69,93	209.711.492	57,74	12,19					
8.4.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.531.600	69,00	69,00	0,00	11.986.300	68,37	11.211.667	63,95	4,42		Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kurahan dan Kaparewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dipecahkan : 1 Paket dari 1 Paket 2. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 1 Paket dari 1 Paket <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan peralatan listrik demi pemerolehan kinerja 2. Pengaktifan kembali akun zoom biro untuk mendukung kelancaran kegiatan 3. Penyediaan dan pemasangan alat perenangan pada ruang kerja <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampu sering mati, perlu pemangangan jaringan listrik ke seluruh gedung lantai 2 2. Efisiensi harga satuan akun zoom di bawah DPA <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terseleskannya laporan tepat waktu.
8.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.203.400	70,50	70,50	0,00	21.432.000	66,55	20.766.700	64,49	2,06		Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kurahan dan Kaparewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipecahkan : 2 Paket dari 2 Paket 2. Alat Tulis Kantor : 1 Paket dari 1 Paket 3. Tabung Pemadam Kebakaran : 1 Paket dari 1 Paket <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD 2. Mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan kantor Bulan September untuk mendukung kelancaran kegiatan 3. Pembelian toner untuk cartridge printer demi kelancaran kegiatan biro 4. Penyediaan ATK s.d. bulan September <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terseleskannya laporan tepat waktu.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
8.4.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	6.984.900	84,50	84,50	0,00	5.832.900	83,51	5.832.900	83,51	0,00		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 2. Perakitan keseluruhan dan bahan pembersih : 1 Paket dari 1 Paket	1. Kecepatan rekaman dalam merespon kebutuhan biro 2. Dedikasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan perakitan dan bahan pembersih SKPD 2. Mengakomodir perakitan rumah tangga s.d. Bulan Desember Faktor Penghambat: Beberapa barang belum tersedia di Mbizmarket.co.id Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekaman untuk merespon dan mengartikan barang pesanan 2. Tanggungjawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8.4.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.489.000	78,00	78,00	0,00	16.460.000	76,60	16.459.400	76,59	0,01		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket 2. Barang cetakan : 1 Paket dari 1 Paket 3. Penggandaan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan SKPD 2. Mengakomodir barang cetakan dan penggandaan s.d. Bulan September Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekaman untuk merespon dan mengartikan barang pesanan 2. Tanggung jawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Koordinasi dan kerjasama antar pegawai yang terjalin baik	
8.4.5	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pengantar-Undangan	11.160.000	76,00	76,00	0,00	8.370.000	75,00	8.370.000	75,00	0,00		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pengantar-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Bahan bacaan Jawa s.d. : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Bahan bacaan Kelautan Rakyat : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan pada SKPD 2. Menediakan bahan bacaan surat kabar harian untuk memberikan informasi yang cukup dalam rangka mendukung kinerja SKPD s.d. Bulan September Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerja sama antarpengawai yang solid 2. Kecepatan penyedia dalam merespon kebutuhan Biro	
8.4.6	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.803.000	85,00	85,00	0,00	189.900.000	84,85	147.070.825	65,71	19,14		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 10 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan komulatif dan koordinasi : 10 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah sampai dengan Bulan September. 2. Target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output karena beberapa koordinasi dilaksanakan menggunakan rapat-rapat keci secara intens. Faktor Penghambat: 1. Efisiensi perjalan dinas, harga di bawah DPA. 2. Masih menunggu penetapan APBD Perubahan 2023 dan kelengkapan informasi karena arahan dari TAPD kegiatan tsb tidak boleh dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi dagli. Namun target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat keci secara intens. Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens 3. Dns kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terseleskannya laporan tepat waktu. 4. Pegawai menyelesaikan laporan tepat waktu	
8.4.7	4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Biro Tata Pemerintahan s.d. Div	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pemeliharaan Website Tahun 2023 Biro Tata Pemerintahan Setai DIY : Website dari 1 Website	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
8.5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan	7.985.000	76,00	76,00	0,00	1.500.000	18,79	1.500.000	18,79	0,00					
8.5.1	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.985.000	76,00	76,00	0,00	1.500.000	18,79	1.500.000	18,79	0,00		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Kordinasi Dinas Operasional Roda 2 : 7 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan materi pada SKPD 2. Mengakomodir kebutuhan materi untuk memenuhi kebutuhan SKPD s.d. Bulan September Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Keasidan pegawai untuk memanfaatkan materi sesuai dengan peruntukannya	
8.6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan	160.364.700	75,84	75,84	0,00	115.899.200	72,27	112.363.200	70,07	2,20					
8.6.1	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan	17.744.300	75,00	75,00	0,00	13.050.000	73,54	12.851.000	72,42	1,12		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Fajknya : 1 Unit dari 1 Unit 2. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : 7 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan 2. Mengakomodir bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas jabatan s.d. Bulan September 3. Pemeliharaan service kendaraan dinas jabatan 4. Mengakomodir kebutuhan suku cadang kendaraan dinas jabatan 5. Koordinasi dan kerjasama antarpegawai yang solid 2. Antisipasi pegawai untuk merawat kendaraan	
8.6.2	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan	105.538.100	74,00	74,00	0,00	76.964.000	72,93	73.641.600	69,78	3,15		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 11 Unit dari 11 Unit 2. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 : 4 Unit dari 4 Unit 3. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : 7 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 2. Perawatan kendaraan dinas operasional untuk mendukung keberanian aktivitas SKPD s.d. Bulan September 3. Mengakomodir bahan bakar minyak dalam bentuk voucher s.d. Bulan September Faktor Penghambat: Efisiensi pajak kendaraan yang dibayarkan di bawah harga DPA Faktor Pendukung: Keasidan pegawai untuk memanfaatkan kendaraan dinas operasional sesuai peruntukannya	
8.6.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	37.082.300	81,50	81,50	0,00	25.885.200	69,80	25.870.600	69,77	0,03		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 5 Unit dari 5 Unit 2. Air Conditioner : 1 Jenis dari 1 Jenis 3. Perakitan Komputer : 3 Jenis dari 3 Jenis 4. LCD Proyektor : 1 Jenis dari 1 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin pada SKPD 2. Pemeliharaan Personal Computer (ganti hardisk, penambahan memori, update aplikasi, dan lain sebagainya) 3. Pemeliharaan laptop 4. Pemeliharaan Air Conditioner (isi freon, pemindaian posisi AC, dan penunruangan AC yang sudah rusak) Faktor Penghambat: 1. Tahun ini dilakukan pengadaan peralatan, padahal AC perlu penggantian yang baru 2. Gangguan listrik mengakibatkan AC kotor dan berbau Faktor Pendukung: 1. Keaktifan pegawai dalam melaporkan kerusakan sehingga dapat ditangani dengan cepat 2. Peranganan keluhan yang responsif	
9	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	454.799.300	97,51	97,51	0,00	438.987.900	96,52	418.659.835	92,05	4,47					
9.1	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	189.099.900	99,61	99,61	0,00	186.069.900	98,40	170.805.250	90,33	8,07					
9.1.1	4.01.03.1.01.02	Finalisasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	147.100.000	99,50	99,50	0,00	144.070.000	97,94	129.025.550	87,71	10,23		BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum : 6 Dokumen dari 6 Dokumen 2. Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD penggantian antar waktu : 4 usulan SK dan 3 usulan SK 3. Penyelesaian dan Pelantikan Pejabat Kepala Daerah (Kabupaten Kuloprogo dan Kota Yogyakarta) : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Laporan hasil Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Berikut usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD : 1. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/10159 tanggal 30 Desember 2022 tentang Permohonan Penarikan Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya telah ditandatangani dengan ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 7/Kep/2023 tentang Penarikan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo 2. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/10159 tanggal 11 Januari tentang Permohonan Penarikan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul atas nama Sukardiyono, S.H. Selanjutnya telah ditandatangani dengan ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 3/Kep/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penarikan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Sukardiyono, S.H. 3. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 70/Kep/2023 tentang Penarikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024. Selanjutnya ditandatangani dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur DIY Nomor: 70/Kep/2023 tentang Penarikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Saadati Seti Endrawati, S.Pd pada tanggal 1 Maret 2023. 4. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/10159 tentang Permintaan Tinjau Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya ditandatangani dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 19/TM/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tinjau Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SPOD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>5. Rapat-rapat Koordinasi dalam rangka Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan Pemberhentian dan Penggantian Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>6. Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor: 177/7462 tanggal 3 Juli 2023 tentang Permohonan Peninsinan Pemberhentian dan Penggantian Anggota DPRD DIY. - Selanjutnya telah ditandatangani dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3107 Tahun 2023 tentang peninsinan Pemberhentian Anggota DPRD DIY - tanggal 31 Juli 2023 atas nama saudara Supriyo, S.P karena meninggal dunia, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3125 Tahun 2023 tentang Peninsinan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD DIY atas nama saudara Christina Ani Retnaningsih, tanggal 3 Agustus 2023.</p> <p>7. Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor : 177/7463 tanggal 3 Juli 2023 tentang Permohonan Peninsinan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY. - Selanjutnya telah ditandatangani dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3188 Tahun 2023 tentang Peninsinan Pemberhentian Anggota DPRD DIY atas nama saudara drg. Hj. Hanum Salsabela, MBA, tanggal 15 Agustus 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3189 Tahun 2023 tentang Peninsinan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD DIY atas nama saudara Madyono, SE, MEK, tanggal 15 Agustus 2023.</p> <p>8. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/03286 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Permohonan Peninsinan Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024. Selanjutnya telah ditandatangani dengan ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 250/KEP/2023 tentang Peninsinan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama saudara H.R. Ichwan tamrin Mursidyanita, S.E., tanggal 15 Agustus 2023 dari Partai Amanat Nasional dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 265/KEP/2023 tentang Peninsinan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Padmini Karyanti, tanggal 23 Agustus 2023.</p> <p>9. Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor: 177/9770 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Peninsinan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Pimpinan DPRD DIY saudara Suhanwanta, ST, digantikan oleh saudara Ir. Amaj.</p> <p>10. Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor : 177/1036 tanggal 13 September 2023 tentang Permohonan Peninsinan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY saudara H. Ahmad Bahaq Rais, B. Bus, M.A, digantikan oleh saudara Suwadi Lesari.</p> <p>Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Kamis, 9 Februari 2023 pukul 09.00-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantia 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Peserta : Tri Agus Inhartha, S.H (Bawasu Kota Yogyakarta) dan Siti Nurhayati (KPU Kota Yogyakarta) S.S. Peserta : PKK se-Kemantren Gondokawuman dan Danurejan. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantia 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Narasumber : Hidayat Widodo (KPU Kota Yogyakarta) dan Noor Harsya Aryscaandro S.S., M.P (Bawasu Kota Yogyakarta) serta Agustina Perseptajati (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY). Peserta : Tim Penggerak PKK Kemantren Kraton, Mergangsan, dan Marbriyeron sejumlah 40 orang. Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu, 15 Februari 2023 pukul 09.30 -selesai di Kantor Kapanewon Panggang, Gunungkidul. Narasumber : Heri Dwi Hariyono, S.H (Komisi A DPRD DIY) ; Supriyo, S.Sos (KPU Kab. Gunungkidul) ; Tri Amayanto (Bawasu Kab. Gunungkidul); Peserta : PKK se-Kapanewon Panggang. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Selasa, 21 Februari 2023 pukul 09.00 - selesai di Kantor Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Narasumber : Bakh Mulyah, SH (Ketua KPU Kab. Kulon Progo) Wagiman M.H. (Bawasu Kab. Kulon progo) dan Anggota Komisi A DPRD DIY Novita karikri Hadis S.T. Peserta : PKK se-Kapanewon Lendah. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 09.00 WIB-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Narasumber: Elio Suwanto (Ketua Komisi A DPRD DIY); Etial (KPU Kota Yogyakarta); dan Muhammad Muslim (Bawasu Kota Yogyakarta); serta peserta dari PKK se-Kemantren Wirobrajan, Pakualaman, Ngemplilan, dan Gondomanan. Sosialisasi Tahapan pemilu Tahun 2024 pada Jumat 3 Maret 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja Lantia 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Narasumber Ketua Komisi A DPRD DIY Elio Suwanto; Hamdan Kurniawan (Ketua KPU DIY) ; dan Drs. Muhammad Najib, M.Si. (Bawasu DIY) Peserta : TP-PKK se-Kemantren Tegajene, Jatis, dan Gedonglengan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. Peserta : TP PKK se-kapanewon Godean dengan Narasumber anggota Sudaryanto, S.H (Komisi A DPRD DIY) ; Ahmad Shidiq, S.T.I., M.Hum (KPU DIY) ; serta Drs. Mohammad Najib, M.S. (Bawasu DIY) Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada 9 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Narasumber Heri Dwi Hariyono, S.H. (DPRD DIY), Awoing Warthen (KPU Kab. Sleman) ; dan Vici Herawati, S.P. (Bawasu Kab. Sleman) ; Peserta TP PKK se Kapanewon Depok, Sleman. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu 15 April 2023 pukul 09.00-selesai di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Narasumber KPH, Purboadiningrat, SE, MBA (Komisi A DPRD DIY) ; Didik Joko Nugroho, S.Ant (KPU Kab. Bantul) ; Sunrisawati, SH, M.Hi, M.Psi (Bawasu DIY) . Peserta : TP PKK se Kapanewon Sewon Bantul. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat 17 April 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantia 3, Biro Tata Pemerintahan. Peserta : TP PKK se Kemantren Umbuharjo dan Kotagede, untuk narasumber Elio Suwanto S.H.Si (Komisi A DPRD DIY) , Vioesti Budiyanto, S.Ag., M.Si. (KPU DIY) , Harlina, S.H (Bawasu Kab. Bantul) <p>Pemilihan Serentak (Pilkada) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Bahan Khusus Keuangan Pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Penyempitan tabelan stat Nomor 270/02151 tanggal 31 Juli 2023 Hal : Bantulan Keuangan Khusus Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se DIY. Rapat Kerja Pelaksanaan Pemilu dan Pengisian Pilkada Serentak Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja Lantia III, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Dalam rapat kerja ini terdapat tiga narasumber yaitu: Kepala Subdirektori Fasilitas Pemilu dan Pengembangan Demokrasi pada Direktorat Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri atas nama Bapak Iqbalan Setiadi, SH, M.Si, Analisis Kebijakan AHLI Muda Wilayah I Direktorat PKN dan DPRD Diwilayah Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak R. Hendy Nur Kusuma, STP, MA, dan Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fasilipi UGM Bapak Bvo Dandis Kurniadi, Ph.D. Peserta rapat dari OPD pengampu / merangeni Fasilitas Pilkada Tahun 2024. Surat Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se DIY, Nomor 390/9632 tanggal 30 agustus 2023 Hal : Desk Pilkada Kabupaten/Kota di DIY <p>Pelantikan PJ Bupati - PJ Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Pejabat Bupati Kulon Progo dan PJ, Wali Kota Yogyakarta dan PJ, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota. Gladi Bersih Pelantikan Pejabat Bupati Kulon Progo dan Pejabat Wali Kota Yogyakarta sekaligus Gladi Bersih Pelantikan Pejabat Ketua TP PKK Kabupaten/Kota pada Minggu, 21 Mei 2023 pukul 13.00-selesai di Bangsal Kepathian dan Gedung Pradimasana. Pelantikan Pejabat Bupati Kulon Progo dan Pejabat Wali Kota Yogyakarta oleh Bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowo Bonura X pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 12.00-selesai di Bangsal Kepathian Pelantikan Pejabat Ketua TP PKK Kabupaten Kulon Progo dan TP PKK Kota Yogyakarta oleh Wakil Ketua I TP PKK DIY GIKMoly Paku Alam pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 15.00-selesai di Gedung Pradimasana. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Efisiensi dari Penyelenggaraan Sosialisasi sebesar Rp.2.000.000 karena narasumber yang tidak hadir 2 O3 (Rp.2.000.000). Efisiensi dari penyelenggaraan pelantikan sebesar Rp.12.297.450 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> efisiensi anggaran baliqada Pelantikan PJ Bupati dan Wali Kota dan Pelantikan PJ TP PKK Kabupaten/Kota Rp.7.000.000, (karena harga pasar lebih tinggi dari anggaran DPA sehingga efisiensi oleh Biro UPR). Efisiensi Honor Rohaniwan Rp.400.000 (hanya Agama Islam saja). efisiensi anggaran Pakalan Dinas Upacara Rp.4.575.450 (harga dibawah DPA) Efisiensi anggaran bumbung SK Rp.142.000 (harga pasar dibawah harga DPA) Efisiensi Cetak (materi) Rp.180.000 (karena narasumber 2 O3 tidak hadir) Efisiensi anggaran ATK sebesar Rp.39.700 (harga pasar dibawah harga DPA) Efisiensi peradilan dalam daerah Rp100.000 (1 Oht tidak dapat mengukit peradilan)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SPOD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
9.1.2	4.01.03.1.01.03	Facilitasi Penataan Wilayah	41.999.900	100,00	100,00	0,00	41.999.900	100,00	41.779.700	99,48	0,52					<p>5. Efisiensi ATK sebesar 35.900</p> <p>6. Menunggu penetapan APBD Perubahan 2023 dan kebijakan refocusing karena arahan dari TAPD kegiatan tsb tidak boleh dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi dari. Namun target output sudah tercapai, hal tersebut tidak mempengaruhi ketercapaian output. Karena dapat dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik dengan Pemkab/kota dan stakeholder terkait. Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana kantor.
9.2	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	75.000.000	91,70	91,70	0,00	66.675.900	88,90	63.459.900	84,61	4,29					<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terusunnya jadwal rencana pelaksanaan kegiatan 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan 3. Terlaksananya rapat koordinasi finalisasi Raperub Pengkoordinasian pembangunan wilayah perbatasan 4. Terlaksananya rapat koordinasi terkait pembahasan penyusunan Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan DIY tahun 2023 5. Tersusunnya surat permohonan personel Tim Pembangunan wilayah perbatasan DIY Tahun 2023 6. Terlaksananya koordinasi dan penyesuaian penyaliran pembangunan wilayah perbatasan di Kab. Sleman dan Kab. Gunungkidul 7. Terlaksananya Rakor Penyaliran Pembangunan Wilayah Perbatasan di DI 8. Terselainya data identifikasi permasalahan di kawasan perbatasan provinsi/kabupaten/kota. 9. Selesaiannya pengabdian jasa TA Penyaliran Pembangunan di Wilayah Perbatasan dengan SPK 027/01521 dan 027/01522 tanggal 24 Mei 2023 10. Identifikasi permasalahan terbanyak di wilayah perbatasan antara lain terkait Sarana dan prasarana, Rumah tinggal Layak Huni, Kesehatan dan Jaga lingkungan 11. Sedangkan arah pembangunan di wilayah perbatasan akan bertitik pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, peningkatan kualitas jalan serta peningkatan kapasitas SPM 12. Pemerintah DIY telah melaksanakan berbagai upaya melalui program dan kegiatan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya antar kabupaten/kota. Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah DIY meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni b) Pembangunan rumah layak huni baru c) Rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan d) Operasi pemeliharaan rutim saluran drainase e) Sosialisasi P4GN f) Pelatihan keterampilan g) Peningkatan pelayanan di Puskesmas pembantu h) Pengembangan pariwisata berbasis desa i) Peningkatan SPM Pedesaan j) Pembinaan terhadap anak sekolah k) Edukasi kesehatan ke masyarakat <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Data potensi permasalahan perbatasan dari Bappeda kabupaten/kota belum disampaikan tepat waktu</p> <p>Terdapat efisiensi sebesar Rp. 220.200 yaitu kertas cover 65.000, bahan komputer Rp. 55.200 dan honor narasumber Rp. 100.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Kerjasama yang solid dan koordinasi yang baik antara OPD Pemda</p>
9.2.1	4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	75.000.000	91,70	91,70	0,00	66.675.900	88,90	63.459.900	84,61	4,29					<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Tim Pelaporan LPDP Tahun 2022 2. Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung LPDP Tahun 2022 3. Penyusunan LPDP Tahun 2022 4. Desk Verifikasi Data dan Dokumen Pendukung LPDP Tahun 2022 5. Revisi Penyusunan LPDP (Rancangan) Tahun 2022 Inspektoral 6. Tindak Lanjut Revisi LPDP 2022 7. Entry data dan dokumen pendukung dalam aplikasi SILPPD 8. SILPPD 9. Pengumpulan bahan/bukti dukung pemutakhiran IKK LPDP 2022 10. Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi LPDP Kab/Kota Tahun 2022 11. Koordinasi Pelaksanaan Uji Petik EPPD Tahun 2023 oleh Tim Nasional berdasarkan LPDP Tahun 2022 12. Entry meeting pelaksanaan uji petik terhadap EPPD Tahun 2023 berdasarkan LPDP Tahun 2022 13. Uji Petik terhadap EPPD Tahun 2023 berdasarkan LPDP Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya 14. Pemutakhiran IKK LPDP Tahun 2022 dalam SILPPD <p>Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Tim Penegakan SPM DIY 2. Pengumpulan data Laporan Penegakan SPM DIY Tahun 2022 3. Entry data laporan SPM 4. Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022 5. Verifikasi data laporan penegakan SPM DIY Tahun 2022 6. Sinkronisasi data SPM 2022 dengan data LPDP 2022 <p>Money dan Pelaporan SPM DIY Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Monitoring input pelaporan SPM TW I Tahun 2023 8. Evaluasi Bertanggungjawab LPDP Kab/Kota se-DIY Tahun 2022 terkait dengan SPM 9. Penyusunan dan Pembahasan Draft Raperub SPM DIY Pengangir Pengu 11/12/2020 10. Penyempurnaan Draft Raperub SPM Pengganti Pengu 11/12/2020 ke Biro Hukum 11. Monitoring input pelaporan SPM TW II Tahun 2023 12. Monitoring dan pencermatan data pelaporan SPM Tahun 2022 TW II dalam aplikasi e-SPM 13. Penyusunan Perubahan Personil Tim SPM 14. Surat Penyusunan RPT Dinas Sosial-CHR Global 15. Evaluasi SPM Perubahan APBD Tahun 2023 Sleman, K9, Kota dan GK <p>Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggapan Pemantauan Informasi (Keterbukaan Informasi Publik) LPDP DIY Tahun 2017 - 2022 2. Rakor Pengalihan Aset jalan dari Kementerian PUPR RI kepada Pemda DIY dan dari Pemda DIY kepada Kemen RI 3. Penyempurnaan data sarana dan prasarana jalan (BMD) yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jating DIY di Semarang 4. Penyempurnaan data (soft copy) kelengkapan data (sertifikat, dll) sarana dan prasarana jalan (BMD) yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jating DIY di Semarang dan sebaliknya untuk diverifikasi 5. Pembahasan permasalahan aset Sumber Daya Air (Inpas) DPLP-ESDM yang akan dimiliki oleh BBNWSD <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat capaian-capaian yang belum optimal dikarenakan IKK LPDP belum menjadi target kinerja OPD yang disupport dengan anggaran 2. Perbedaan persepsi terkait definisi IKK 3. Terdapat efisiensi et cost perjalanan dinas narasumber dan honor narasumber (anggaran eselon II yg hadir eselon III) dan ATK <p>SPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang dihasilkan pada Pendataan SPM berdasarkan Permenandi 59/2021 belum lengkap 2. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan SPM Pemukiman Rakyat (Penyediaan RLH) dari hasil pendataan 10 rumah yang diakuisisi anggarannya 3 rumah (*Makna Bersana Merap 2010) <p>Masih menunggu penetapan APBD Perubahan 2023 dan kebijakan refocusing karena arahan dari TAPD kegiatan tsb tidak boleh dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi dari. Namun target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>LPDP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk Pelaporan Pemda DIY Tahun 2022 sinkron baik di LPDP, LK9, LAMP, LKUP dan SPM 2. Penyempurnaan persepsi dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait (Inspektoral maupun OPD) terkait definisi IKK terutama pada saat evaluasi/pemutakhiran <p>SPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pelaporan triwulanan pada aplikasi eSPM 2. Pelaporan SPM Tahun 2022 telah menggunakan format sesuai dengan Permenandi 59 Tahun 2021 3. Disepakatinya Dana Kestimewaan dapat digunakan untuk mendukung pemenuhan SPM 4. Koordinasi intensif timda SPM dengan Sekber SPM Pusat. <p>So. Fein ada Surat Gubernur kepada OPD Pengumpul SPM di Pemda DIY terkait Pelaporan Triwulanan dan Pendataan SPM (Update) per Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Telah ada kesepakatan di Internal Pemda DIY dan Kab/Kota se-DIY terkait permasalahan pelaporan SPM pada Aplikasi eSPM 7. Moner SPM tidak hanya dilakukan dengan anggaran dari Biro Tapem tetapi juga dalam forum evaluasi Perda Pertanggungjawaban APBD/RAPBD/PAPBD, juga dilaksanakan melalui anggaran Dekontribusi GWP yang diampun oleh Inspektoral maupun dari keanggotaan Tim SPM lainnya
9.3	4.01.03.1.03	Facilitasi Kerja Sama Daerah	190.699.400	97,70	97,70	0,00	186.242.100	97,66	184.394.685	96,69	0,97					
9.3.1	4.01.03.1.03.01	Facilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	190.699.400	97,70	97,70	0,00	186.242.100	97,66	184.394.685	96,69	0,97					<p>1. Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>-Penyusunan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Reger-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan tim TKSD sebagai pendukung kelancaran penyusunan naskah kerjasama 2. Melakukan rapat koordinasi penyusunan naskah

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SPOD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>kerjasama bulan Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri : 1. Rabu, 1-2-2023, Pembahasan naskah PKS antara Pemda DIY dengan PT Bank Mandiri 2. Kamis, 2-2-2023, Pembahasan KSB antara Pemda DIY dengan Universitas Sebelas Maret 3. Selasa, 14-3-2023, Pembahasan usulan naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan STPKat Santo Fransiskus Assisi Semarang 4. Selasa, 21-3-2023, Pembahasan naskah PKS antara PPKD DIY dengan DTK Kabupaten Karanganyar Library For All di DIY 5. Senin, 3-4-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan RS Sardjito dik. 6. Rabu, 12-4-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan STPKat Santo Fransiskus Assisi Semarang 7. Selasa, 9-5-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara 8PDS dengan Pemda DIY 8. Jumat, 12-5-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pemda Jabar dengan Pemda DIY 9. Selasa, 6-5-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pertamina dengan Pemda DIY 10. Jumat, 9-6-2023, Rapat koordinasi jejaring pengempuan 11. Jumat, 7-7-2023, persiapan penandatanganan naskah kerja sama Kelurahan Salak jejaring pengempuan 12. Senin, 10-7-2023, pembahasan naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Sumatera Selatan 13. Selasa, 1-8-2023, pembahasan naskah kerja sama (KSB) TPA Piyungan 14. Kamis, 3-8-2023, pembahasan naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan BKBN 15. Jumat, 15-9-2023, pembahasan rencana kerja Pemda DIY dengan Lemhanas 16. Rabu, 20-9-2023, pembahasan kartu tani 17. Rabu, 27-9-2023, inventaris dan analisis kerja sama daerah Kabupaten/Kota se-DIY <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa Tim THOSD mengalami perubahan personel 2. Masih ada beberapa instansi yang belum memahami tentang jenis kerja sama apa saja yang bisa di fasilitasi di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 3. Sangat susah mengumpulkan Tim THOSD secara utuh pada forum rapat off line. <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim THOSD telah memahami dasar hukum pelaksanaan kerja sama daerah di DIY yaitu PP28/2018 dan Permendagri 22/2020. 2. Tim THOSD sangat membantu dalam proses pembahasan naskah kerja sama karena menengahi permasalahan yang timbul antar para pihak ketika proses penyusunan tata naskah. 3. Rapat on line sangat membantu dalam pelaksanaan rapat penyusunan naskah kerja sama karena karena dirasa lebih memudahkan Tim THOSD untuk bisa menguji rapat di sela kesibukan masing-masing.
10	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMWEEAN URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	3.193.542.350	80,81	80,81	0,00	1.892.909.150	59,27	1.286.472.545	40,28	18,99					
10.1	4.01.10.5.01	Pemetaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kestimewaan	2.874.183.550	78,68	78,68	0,00	1.573.550.350	54,75	974.988.445	33,92	20,83					
10.1.1	4.01.10.5.01.10	Pertimbangan Penerapan Kestimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	2.874.183.550	78,68	78,68	0,00	1.573.550.350	54,75	974.988.445	33,92	20,83	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Biro Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Kemantren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Penerapan Kestimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Ditina : 8 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kaparewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan tindak lanjut aksi rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kaparewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan : Laporan dari 1 Laporan 4. Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi 5. Sosialisasi Kelembagaan Asli Daerah : 60 kali dari 60 kali 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan : Laporan dari 98 Aparatur 7. Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kelurahan : kali dari 4 kali 8. Kajian Redaman Pengembangan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 9. Fasilitas, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kelurahan pada 392 Kelurahan (392 Kelurahan sudah mengisi co reform space) : Laporan dari 1 Laporan 	<p>Tahapan pekerjaan (file) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Penerapan Kelembagaan Kelurahan / Kelurahan/Kelurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Kemantren 2) Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan koordinasi internal mengenai bahan materi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait . 3) Terakutannya Koordinasi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten/Kelurahan melalui koordinasi lapangan ke Kabupaten/Bantul dengan lokasi Kelurahan Guwoarsi. Kemudian koordinasi dengan instansi pengumpul perni pemerintah kalurahan dilakukan melalui forum rapat kerja penyempurnaan pemantauan kalurahan dengan sasaran pembahasan 8 area perubahan pada penerapan reformasi birokrasi kalurahan sebagai berikut: a. Tanggal 24 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area manajemen perubahan dan peraturan perundangan b. Tanggal 25 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area pengoptimalan organisasi, tata laksana dan penguatan pengawasan c. Tanggal 26 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan SDM d. Tanggal 30 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan Akuntabilitas e. Tanggal 31 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan Pelayanan Publik Quick Wins dan Lembar Kerja Evaluasi <p>-Pengutan terhadap kebijakan reformasi birokrasi kalurahan melalui Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan sebanyak 4 kali melibatkan OPD Pemda Kabupaten, Pagaruyuban Lurah dan Pemang serta kaparewon dengan rundown:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 21 Februari di Kabupaten Bantul b. Tanggal 22 Februari di Kabupaten Gunungkidul c. Tanggal 27 Februari di Kabupaten Kulon Progo d. Tanggal 27 Februari di Kabupaten Sleman e. Koordinasi bersama Akademi untuk menelaah draft perubah Reformasi Birokrasi Kelurahan pada tanggal 15 Maret untuk mendetailkan juknis RBKai. <p>- Pelaksanaan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Kemantren</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 26 Maret di Kelurahan Gedongkwo, Kemantren Mangrove, Kota Yogyakarta b. Tanggal 28 Maret di Kelurahan Mangunan, Kaparewon Dingo, Kabupaten Bantul c. Tanggal 29 Maret di Kelurahan Guwoarsi, Kaparewon Pajangan, Kabupaten Bantul d. Tanggal 31 Maret di Kelurahan Muruk, Kaparewon Dingo, Kabupaten Bantul e. Tanggal 6 April di Kelurahan Wukirsari, Kaparewon Cangkringan, Kabupaten Sleman f. Tanggal 11 April di Kelurahan Sidomulyo, Kaparewon Peneleh, Kabupaten Kulon Progo g. Tanggal 14 April di Kelurahan Tileng, Kaparewon Giribus, Kabupaten Gunungkidul e. Tanggal 19 Mei Pelaksanaan Forum Komunikasi melibatkan SDM Nelayanta dan OPD Pemda DIY f. Tanggal 21 Agustus Pelaksanaan Forum Komunikasi melibatkan SDM Pagaruyuban Lurah DIY Nelayanta h. Tanggal 22, 25, 28, 29, 30, 31 Agustus 2023 dengan lokasi peserta dari Kota Yogyakarta <p>- Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan melibatkan unsur dari Pagaruyuban Dukuh se DIY dengan melibatkan pemateri dari Kotan dan Nelayanta pada tanggal 28 Februari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Sosialisasi Kelembagaan Asli DIY, <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pengoptimalan materi dan penyusunan kerangka kerja rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelembagaan asli DIY dengan hasil pelaksanaan di bulan Februari sebanyak 10 kali melibatkan aparatur pemerintah kalurahan di Kabupaten Sleman -Terakutannya sosialisasi kelembagaan asli Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan Lurah/Pemang Kelurahan, Badan Penyelenggaraan Kelurahan serta Ketua Dukuh, dengan rundown sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal 21-24 Februari dengan lokasi peserta dari Kelurahan se-Kabupaten Sleman b. Tanggal 27 Februari dengan lokasi peserta dari Kabupaten Bantul c. Tanggal 8, 9, 15, 16 dan 17 Maret dengan lokasi peserta dari Kabupaten Gunungkidul d. Tanggal 8, 9, 15, 16, dan 17 Maret 2023 dengan lokasi peserta dari Kabupaten Gunungkidul e. Tanggal 11, 15, 16, 17 dan 19 Mei 2023 dengan lokasi peserta dari Kabupaten Kulon Progo f. Tanggal 15, 16, 22, 23 dan 26 Juni 2023 dengan lokasi peserta dari Kota Yogyakarta g. Tanggal 12, 14, 17, 21 dan 26 Juli 2023 dengan lokasi peserta dari Kota Yogyakarta h. Tanggal 22, 25, 28, 29, 30, 31 Agustus 2023 dengan lokasi peserta dari Kota Yogyakarta 3) Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi untuk membahas KAK dan Focus Group Discussion Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan dengan konteks Kajian Peta Jalan / roadmap Sistem Informasi Kelurahan dipada tanggal 15 Juni 2023. -Rapat Koordinasi pembahasan kerangka acuan kerja kajian peta jalan sistem informasi kalurahan - Focus Group Discussion Kajian Peta Jalan Sistem Informasi Kalurahan pada tanggal 15 Juni dan 10 Agustus -Ekspose Kajian Peta Jalan Sistem Informasi Kelurahan pada tanggal 22 Agustus - Tersedianya data hasil identifikasi permasalahan pemanfaatan sistem informasi kalurahan melalui draft rancangan Kajian Peta Jalan Sistem Informasi Kelurahan. - Tersusunnya dokumen kajian peta jalan Sistem Informasi Kelurahan dengan terbitkannya Belang Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Telematika sebesar 1 Paket. -Pemeliharaan Sistem Informasi Kelurahan -Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemeliharaan substansi pemeliharaan sistem informasi kalurahan dengan konteks penambahan menu "co-reform space" pada tanggal 11 September. 4) Fasilitas, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi 		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SPOD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 392 Kalurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Penyelarasan Konsep Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tanggal 10, 13 dan 25 Juli dengan hasil bahwa reformasi birokrasi kalurahan bertumpu pada 4 hal kegiatan utama, yaitu: manajemen kinerja kerja dan keuangan, penguatan pengawasan, penguatan pelayanan publik, dan penguatan SDM serta untuk rencana aksi nantinya disusun berdasarkan keempat rumpun kegiatan utama tersebut. - Rapat Koordinasi Pembahasan Konsep rancangan Reformasi Birokrasi Kalurahan bersama Tim RBKd pada tanggal 6, 7, 10 dan 25 Juli - Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan pada tanggal 20 September dengan hasil penetapan pemohonan SK Tim RBKd menyesuaikan dengan tata cara waktu Penetapan Rapengub RBKd. <p>5) Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Penyelarasan Pemahaman Kerangka Acuan Kerja Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan - Pelaksanaan Focus Group Discussion Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan pada tanggal 25 September menghadirkan narasumber dari akademisi dan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, melibatkan audience dari Dinas PMKd Kabupaten dan Pwlyatan Pemong. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli DIY sebagai kegiatan usulan legislatif terdapat pelaksanaan tanpa kehadiran narasumber dari DPRD DIY, sehingga adanya pengembalian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Februari honorarium narasumber @1.000.000 x 3 - Maret honorarium Narasumber @1.000.000 x 4 - Juni honorarium narasumber : @1.000.000 x 2 - uang transport peserta: 60.000x 23 - Juli Pengembalian honorarium narasumber Agustus: pengembalian honorarium narasumber: @1.000.000 x 4 a. sosialisasi kelembagaan asli DIY: @1.000.000 x 4 b. Raker Forkom Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan / Kelurahan dan Kapanewon / Kemantren: @1.000.000 x 4 2. Efisiensi Zoom, sebesar 1.449.949 <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan giat sosialisasi kelembagaan asli DIY, adanya komitmen peserta undangan untuk hadir mengikuti dan berperan aktif. 2. Kemudahan koordinasi dengan bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta terkait pelaksanaan Sosialisasi Kelembagaan Asli DIY sehingga unsur sasaran kegiatan terjangkau. 3. Ketersediaan waktu dan bahan paparan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Masukan dan arahan dari OPO Pemda DIY dalam mencermati draft rapengub reformasi birokrasi kalurahan. 4. Komitmen Tenaga ahli dalam penyusunan kajian peta jalan sistem informasi kalurahan 5. Ketersediaan waktu penyelesaian dokumen Kajian Peta Jalan Sistem Informasi Kalurahan 6. Ketersediaan narasumber dari akademisi dan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta pada FGD Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10.2	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Kelestimewaan	319.358.800	100,00	100,00	0,00	319.358.800	100,00	311.484.100	97,53	2,47					
10.2.1	4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksanaan Urusan Kelembagaan	319.358.800	100,00	100,00	0,00	319.358.800	100,00	311.484.100	97,53	2,47		BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Sine Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY - Pelaksanaan Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY <ol style="list-style-type: none"> 2) Air Conditioner <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Air Conditioner - Pelaksanaan Pengadaan Air Conditioner dengan spesifikasi: AC PSC, spesifikasi: 1 pik 3) Printer <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Printer - Pelaksanaan Pengadaan Printer dengan spesifikasi: PRINTER HP LASERJET PRO MFP M4277dw 4) Televisi <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Televisi - Pelaksanaan Pengadaan Televisi dengan spesifikasi: 60" 5) Personal Computer <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Personal Computer - Pelaksanaan Pengadaan Personal Computer dengan spesifikasi: All In One PC-Black-Monitor 21 in,USB Keyboard &M... 6) Laptop <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Laptop - Pelaksanaan Pengadaan Laptop dengan spesifikasi i-7 7) LCD <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan LCD - Pelaksanaan Pengadaan LCD dengan spesifikasi: LCD 5300 Lumen WIFI Projector <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada hambatan berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlibatnya Pemakaian Gedung 3 Jenggotan dari Dinas PU untuk dipergunakan Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY - Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang sesuai spesifik
Jumlah			5.406.383.650	77,02	77,02		3.453.794.050	63,88	2.727.596.912	50,45						